

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGULAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROPINSI ACEH

Akhmad Baihaqi* dan A. Humam Hamid*

ABSTRACT

Aceh province is a potential area of agricultural resources. This resource is the main livelihood in rural communities. The low income of farmers and resulted in the inability of agricultural management resulted in the magnitude of the farming community who are in poverty. This study aims to provide models of agribusiness development to reduction of poverty in Aceh. The results of review provide an indication of the factors that support poverty in the farming community is the lack of tried ability and creativity, lack of education and skills and lack of access to capital and land availability. Measures to reduce poverty in the agricultural sector can be done with agribusiness development upstream-downstream, to strengthen the partnership of farmers and groups, partnership groups and entrepreneurs (market access), improving skills match the needs and based on local resources, create and develop regional integrated agribusiness based on local resources.

Keywords: agribusiness, poverty, agriculture development

PENDAHULUAN

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan standar kehidupan lain (Herbert, 2001). Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait (multidimensi) yang menimpa hampir seluruh wilayah pedesaan maupun perkotaan. Hall dan Midgley (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu lain dalam masyarakat secara ekonomi. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya

aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas

Kemiskinan Dalam Sektor Pertanian di Aceh secara signifikan dan positif berhubungan dengan hidup di daerah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Faktor-faktor lain yang relevan terkait dengan kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga, serta rumah tangga yang dikepalai perempuan. Secara geografis, kabupaten-kabupaten yang paling dekat dengan Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, sementara kabupaten di Tengah dan Selatan Aceh menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Sebuah prioritas utama bagi Pemerintah Aceh dalam mengurangi kemiskinan harus fokus pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah pedesaan .

* Staf Pengajar Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Untuk keluar dari kemiskinan, masyarakat miskin di Aceh harus meningkatkan kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas, produktivitas khususnya pertanian dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Setiap strategi pengentasan kemiskinan harus fokus pada peningkatan produktivitas sektor pertanian. Hal ini harus dikaitkan dengan strategi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin (pengembangan keterampilan, difusi teknologi dan rehabilitasi aset fisik) serta menghubungkan mereka dengan kutub-kutub pertumbuhan di daerah perkotaan (infrastruktur pedesaan yang lebih baik dan akses ke pasar).

Strategi untuk pertumbuhan pertanian perlu memperhitungkan risiko lingkungan yang potensial terkait dengan konversi lahan dalam konteks lokal dan harus fokus untuk meningkatkan produksi di daerah-daerah yang sudah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Sektor pertanian dan perikanan yang lebih produktif akan lebih kompetitif dan dapat memperluas produksi (lewat ekspor dan substitusi impor), meningkatkan permintaan tenaga kerja di sektor ini. Memiliki bisnis non-pertanian dan keterlibatan dalam produksi pertanian juga telah diidentifikasi sebagai faktor yang meningkatkan kemungkinan untuk keluar dari kemiskinan.

Pendekatan agribisnis merupakan salah satu langkah dalam pengentasan kemiskinan bagi daerah berbasis pertanian. Menurut Downey and Erickson (1987) dalam Saragih (1998), Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi,

pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

Pengertian Agribisnis Menurut Firdaus (2009), aktivitas pertanian dengan pandangan secara luas, agribisnis mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan sarana produksi pertanian (farm supplies) sampai dengan tata niaga produk pertanian yang dihasilkan usaha tani atau hasil olahannya.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah dan tantangan global di sisi yang lain, maka untuk menjaga stabilisasi sosial-ekonomi Provinsi Aceh dalam jangka panjang diperlukan strategi menciptakan pengembangan bagi keseimbangan pertumbuhan antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi, kendala, dan peluang masing-masing. Sektor-sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi dalam menggerak perekonomian yang keberlanjutan perlu dikelola secara sungguh-sungguh dan memadai.

Berdasarkan data BPS Aceh Tahun 2012 terhadap laju pertumbuhan produk domestik regional bruto dengan migas menurut penggunaan (persen), 2010-2011, terjadi peningkatan pertumbuhan dari 2,79 menjadi 5,02 persen. Pertumbuhan sektor perekonomian, juga ditandai oleh berkembangnya kota-kota industri. Kota industri ini merupakan sumber permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pertanian. Disisi lain dengan makin berkembangnya transportasi, teknologi pengolahan dan teknologi penyimpanan maka produk-produk olahan pertanian dapat

diproduksi dan untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumsi masyarakat yang semakin meningkat dan beragam.

Sektor pertanian saat ini berpotensi untuk dikembangkan diberbagai wilayah di Provinsi Aceh. Pengembangan sektor pertanian memiliki nilai tambah terhadap berbagai aspek perekonomian seiring bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan konsumsi, pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Sesuai dengan kondisi ekologi dan geografis di beberapa wilayah Provinsi Aceh sangat memungkinkan untuk dikembangkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan berbagai langkah-langkah pengembangan agribisnis dalam rangka mengurangi kemiskinan terhadap petani di Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder dengan sumber data Badan Pusat Statistik, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan kajian pustaka yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan

pemberdayaan pertanian. Ruang lingkup dari kajian ini mencakup tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, karakteristik rumah tangga miskin dan aspek pendukung penanggulangan kemiskinan di bidang pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan standar kehidupan lain (Herbert, 2001). Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait (multidimensi) yang menimpa hampir seluruh wilayah, baik pedesaan maupun perkotaan. Penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor alamiah dan non-alamiah. Sementara itu, jenis kemiskinan juga dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (BPS, 2007 dalam Agussabti, et.al., 2009).

Tabel 1. Gambaran Perbandingan Kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional

	Garis Kemiskinan Pendapatan (Rp/Bulan)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Aceh	261.896	278.389	21,80	20,98	885.793	895.020
Nasional	220.996	242.815	14,15	13,33	31.761.840	30.996.063

Sumber: TNP2K, 2013.

Faktor utama penyebab kesmiskinan adalah: (1) kurangnya usaha/kurangnya kreatif dari masyarakat miskin, (2) karena berasal dari golongan miskin, (3) rendahnya

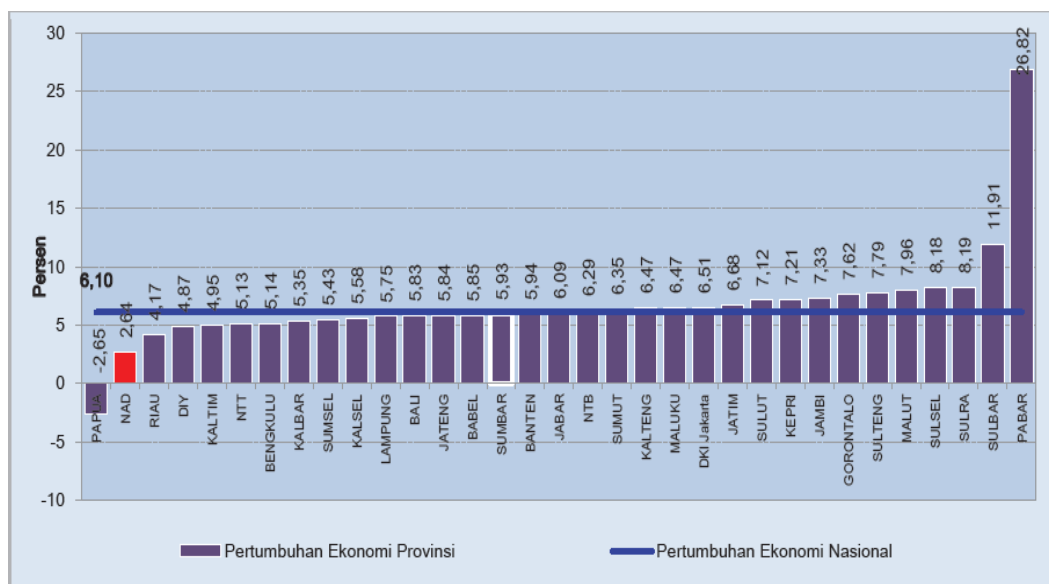
pendidikan/keterampilan, (4) keterbatasan modal/lahan, dan (5) karena faktor lainnya, seperti sakit, cacat dan tua. Apabila dikaitkan dengan teori sudut pandang penyebab

kemiskinan yang telah dikemukakan tadi, maka temuan penyebab kemiskinan di lapangan dapat dikategori secara berturut-turut dari sudut pandang faktor penyebab individual, keluarga, agensi dan struktural (Agussabti, et.al., 2009). Keadaan rumah tangga miskin biasanya mempunyai jumlah anggota keluarga, hal ini berhubungan dengan tingkat kelahiran yang tinggi pula pada keluarga miskin. Dampak yang ditimbulkan seringkali dijumpai keluarga miskin yang tidak sanggup memenuhi standar minimal kebutuhan gizi keluarga sehingga menghambat peningkatan sumber daya manusia di masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian Agussabti, et.al., (2009), dari empat katagori pedesaan yang diteliti yaitu desa pesisir, desa kota, desa dataran tinggi dan desa dataran rendah terdapat lima kondisi kemiskinan. Kelima kondisi yang memberi dampak terhadap kemiskinan adalah, kurang usaha/kreatif (32%), rendah pendidikan

(26%), berasalah dari golongan miskin (26%), keterbatasan modal dan sumber daya lahan (15%), dan dalam kondisi tua, sakit dan cacat (2%). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa faktor utama kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kreatifitas, lahir dari golongan miskin, rendahnya pendidikan. Disisi lain kondisi kesehatan dan usia bukanlah faktor utama penvetus kemiskinan.

Ditinjau dari Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh yang dicatat oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Tingkat pertumbuhan Provinsi Aceh pada tahun 2010 sebesar 2,61%, kondisi ini berada dibawah Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 6,1%. Dampak rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dirasakan oleh mayoritas masyarakat yang hudup di pedesaan dan mereka bermata pencaharian di sektor pertanian. Grafik berikut menjelaskan posisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dengan provinsi lain di Indonesia.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi

Sumber: TNP2K, 2013

Potret Keluarga Miskin

Agussabti, et al. 2009 memberikan hasil penelitian terhadap

tiga tipe wilayah dengan sudut pandang sumberdaya yang dapat diakses penyebab kemiskinan, ditemukan: 1) Wilayah pesisir, kemiskinan disebabkan semakin sulitnya nelayan memeproleh ikan dari posisi pantai, kondisi ini diakibatkan kerusakan terumbu karang dan pembagian yang kurang adil antara nelayan (*aneuk pukat*) dengan pemegang modal (*toke boat dan toke bangku*) dari hasil tangkapan ikan; 2) Wilayah perkotaan, kemiskinan disebabkan kurangnya keterampilan yang bisa diberdayakan untuk kegiatan ekonomi. Umumnya masyarakat miskin bekerja sebagai jasa buruh atau tukang becak dan tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain; 3) Wilayah desa biasa (*platland*), kemiskinan disebabkan nilai tukar hasil pertanian yang diusahakan semakin rendah dibandingkan dengan bahan pangan utama yang mereka butuhkan, kondisi ini di contohkan seperti nilai tukar kelapa dengan minyak goreng atau gula. Harga kelapa tetap atau bahkan nilainya semakin turun, sedangkan harga minyak goreng atau gula semakin meningkat. Pertukaran nilai harga yang mereka terima sekarang semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga; (4) Wilayah desa upland, kemiskinan disebabkan belum tersedianya akses jalan produksi menuju sentra produksi, sehingga berdampak terhadap waktu menuju kebun relatif lama dan tenaga.

Hasil Demapan di Kabupaten Aceh Timur menjelaskan bahwa, penguasaan aset rumahtangga miskin dapat dikelompokkan atas (a) lahan, (b) ternak, dan (c) aset rumah tangga lainnya. Keluarga miskin di pedesaan masih mengandalkan aset lahan pertanian sebagai salah satu aset utama, lahan pertanian yang dikuasai sebagai sarana berproduksi dan memperoleh pendapatan bagi daerah pertanian. Kondisi desa demapan menunjukkan

bahwa hanya sebagian kecil dari keluarga miskin yang memiliki lahan pertanian baik dalam bentuk sawah, kebun, pekarangan dan tambak untuk daerah pesisir. (Baihaqi, A. 2013).

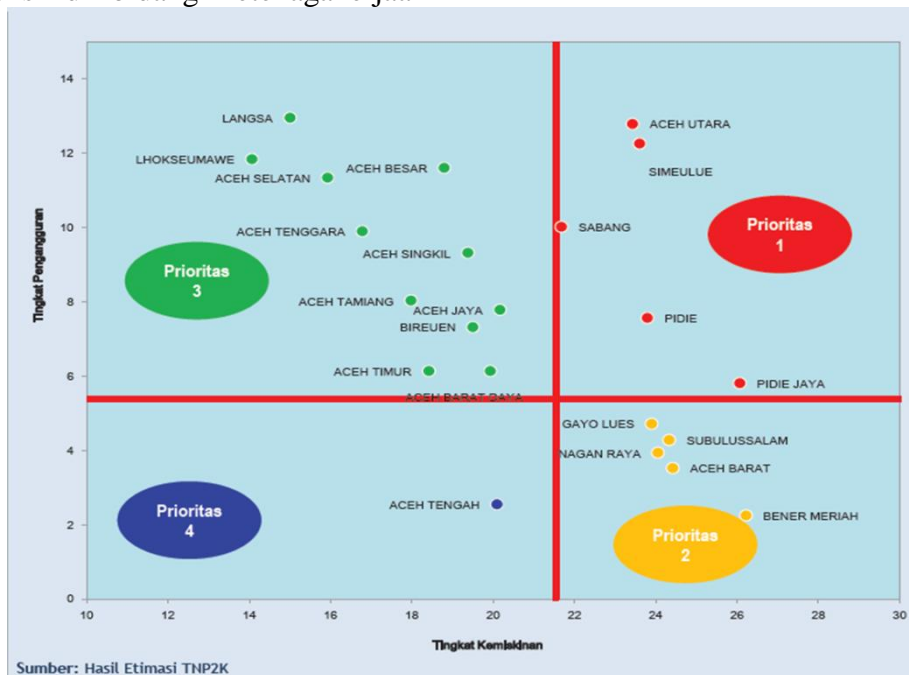
Peningkatan SDM

Upaya untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia atau petani di Indonesia menghadapi suatu dilema dengan keanekaragaman kendala atau kelemahan yang ditampilkan oleh pembangunan itu. Para petani di Indonesia memiliki kelemahan dalam hal wawasan atau pola pikir yang kurang profesional atau kurang beroreintasi komersial, mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, pengetahuan atau keterampilan usahatani yang rendah serta pemilikan tanah yang sempit. Keadaan ini akan menghambat mereka untuk memanfaatkan peluang pasar, modal, informasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi. Jika diamati perkembangan petani atau pengusaha kecil di Indonesia saat ini, mereka menghadapi masalah serius yang menyangkut kemampuan manajemen, pemasaran hasil serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Tindak lanjut tahapan prioritas peningkatan sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2012 dibagi menjadi empat prioritas. Kabupaten dan kota di Provinsi Aceh perlu dilakukan intervensi di bidang ketenagakerjaan dengan berbagai aspek pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia diutamakan dilakukan pada daerah dengan prioritas berturut-turut adalah daerah Prioritas 1, 3, 2 dan 4. Kegiatan obyektif bagi petani atau pengusaha kecil di lapangan menuntut perlunya pembinaan, penyuluhan, bimbingan maupun konsultasi secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. seperti

dijelaskan pada gambar prioritas intervensi di bidang ketenagakerjaan

berikut.



Pengentasan kemiskinan dalam program pemerintah di bidang pertanian

Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk mengurangi kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Aceh telah melaksanakan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan dibidang yang dapat membantu sektor pertanian secara umum, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) dan Alokasi Dana Gampong (ADG). Lebih lanjut dalam program pembangunan yang luas langkah-langkah dalam pengentasan kemiskinan di daerah-daerah dengan pengembangan potensi pertanian secara terintegrasi mencakup: 1) Penetapan Komoditas Unggulan, 2) Potensi Daerah Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan, 3) Penetapan Wilayah Sentra Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan, 4) Prioritas Komoditi dan Wilayah Kecamatan Pengembangan

Komoditas Unggulan, dan 5) Mengembangkan Pemasaran Hasil.

Prioritas komoditi sub sektor pertanian yang dapat dikembangkan di Provinsi Aceh disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya mencakup sub sektor tanaman pangan adalah : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kentang, kacang ijo, ubi kayu dan ubi Jalar. Sub sektor perkebunan: sawit, karet, kopi, kakao, pala dan nilam. Sub sektor perikanan: udang, kerapu, kakap, bandeng, kepiting, mas, nila dan mujair. Sub sektor peternakan: sapi, kerbau, kambing, dan unggas

Pengembangan Agibisnis di wilayah berbasis pertanian

Pemilihan komoditas dilakukan untuk mendapatkan alternatif komoditas unggulan yang sesuai dikembangkan berdasarkan kesesuaian lahan di daerah kabupaten. Peringkat komoditas yang telah di pilih merupakan jenis- jenis komoditas yang banyak diusahakan oleh rakyat dan selanjutnya melibatkan jenis-jenis komoditas baru yang berpotensi untuk

dikembangkan. Seleksi pemilihan komoditas juga bertumpu pada segi agroteknologinya untuk dikembangkan lebih lanjut serta potensi pasarnya baik domestik maupun ekspor, nilai tambah ekonomi bagi petani serta dampaknya terhadap kesempatan kerja dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dari seleksi ini akan didapatkan beberapa komoditas terpilih baik berupa tanaman pangan, perkebunan, maupun tanaman hortikultura (soemarmio, 1996).

Kegiatan Prioritas yang dapat dikembangkan oleh pemangku kepentingan dalam upaya pemberdayaan pertanian adalah:

1. Perluasan Areal tanam dan Manfaatkan Lahan Terlantar
2. Pengadaan dan Penyuluhan Penggunaan Bibit Unggul dan Mesin/Alat Pertanian
3. Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Good Agricultural Practice

Proses Adopsi Pengembangan Agribisnis Wilayah Pedesaan

Penciptaan nilai dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan sektor pertanian, terdapat 3 aspek utama yang dapat ditempuh yaitu; 1) Asistensi dan dukungan dalam pengembangan komoditi; 2) Modal untuk membentuk atau mengembangkan usaha; serta 3) Kemampuan kewirausahaan usaha. Ketiga aspek kegiatan tersebut diperkuat dengan menempuh penciptaan nilai tambah yang dapat dikembangkan melalui tahapan: 1) penyediaan database petani dan lahan, 2) kemampuan adopsi teknologi, manajemen dan pembinaan kelompok, 3) penyediaan modal bergulir, 4) jaringan kerjasama pelaku produksi, 5) penyediaan unit proses, dan 6) pengembangan pemasaran (Anhar dan Baihaqi, 2010).

4. Mendorong LKM untuk Pengadaan Modal Usahatani
Berdasarkan model pengembangan, langkah-langkah implementasi dilapangan dapat dilakukan beberapa model, yaitu:

1. Bantuan Langsung Masyarakat dengan perangkat program prioritas
2. UPTD Komoditas Unggulan Daerah
3. Model Pengembangan Kearifan Lokal berdasarkan potensi daerah
4. Model Kemitraan Horizontal dan Vertikal
5. (Gapoktan, Kontrak Penjualan dan Adopsi Teknologi-Manajemen)
6. Model Pengembangan Agribisnis Terpadu (Sub-sistem Agro-Input, Subsistem Agro-Produksi, Sub-sistem Agro-Industri, dan Sub-sistem Agro-Niaga, serta Pendukung).

Romano (2010).

Penguatan usaha-usaha di bidang pengolahan hasil pertanian yang meliputi kegiatan-kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan produk yang menghasilkan produk segar, produk olahan utama, produk ikutan, dan produk limbah, serta pembangunan pemasarannya, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Upaya peningkatan dan penciptaan nilai tambah komoditi pertanian, dapat dilakukakan dengan memperkuat kemampuan ketrampilan penduduk miskin di daerah pertanian. Upaya-upaya ini tidak lagi mengedepankan pendekatan bantuan input, upaya yang dilakukan adalah menggerakkan ketrampilan dan inovasi secara sistematis dan berkesinambungan (Anonymous. 2004).

Pemerintah dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian (2013)

dalam upaya pengembangan dan peningkatan nilai tambah telah merencanakan upaya peningkatan taraf ekonomi pelaku pertanian memiliki sasaran dalam pengembangan inovasi, diantaranya adalah:

1. Meningkatnya nilai tambah produk dan keragaman produk olahan pertanian. Pendapatan petani/wirausaha diharapkan meningkat 5 - 10%.
2. Efisiensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pangsa pasar domestik dan internasional.
3. Tumbuh kembangnya usaha-usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
4. Meningkatnya investasi agribisnis hilir.
5. Tumbuhnya wirausahawan dibidang pemasaran dan pengolahan hasil pertanian.
6. Tumbuhnya industri penunjang dan lembaga perekonomian di pedesaan.
7. Tersedianya sarana dan prasarana bagi usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Untuk mencapai sasaran, strategi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan adalah startegi yang mampu diadopsi SDM lokal. Strategi pengembangan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat, swasta dan kelembagaan agribisnis dalam usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
2. Meningkatkan peran serta kelembagaan sosial budaya dan kelembagaan ekonomi yang telah mengakar dan menyatu di masyarakat dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
3. Meningkatkan sinergi perdagangan antar daerah dan dengan variasi komoditi

4. Penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan-ketentuan serta kebijakan agar tercipta iklim kondusif bagi pengembangan sistem dan usaha pengolahan dan pemasaran
5. Keberpihakan kepada petani kecil dan UKM dalam pengolahan dan pemasaran dengan tetap mendorong usaha-usaha skala besar
6. Mendorong terciptanya SDM yang handal dibidang traders, market intelegence dan negosiasi
7. Mendorong pengembangan investasi di bidang pengolahan dan pemasaran termasuk industri penunjang, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
8. Memfokuskan kepada komoditas unggulan dengan memperhatikan aspek pasar dan sumberdaya serta revitalisasi industri pertanian yang sudah ada dan mendukung pengembangan klaster industri

KESIMPULAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan pertanian yang sangat luas, baik dari usaha pertanian hilir hingga industri hulu. Sebagai daerah pertanian, penduduk Provinsi Aceh terutama di daerah pedesaan yang menggantungkan hidup di sektor pertanian masih sangat tinggi berada dalam garis kemiskinan, kondisi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi masih dibawah rata-rata nasional. Faktor-faktor yang mendukung kemiskinan pada masyarakat pertanian tersebut adalah rendahnya kemampuan berusaha dan kreativitas, rendahnya pendidikan dan ketrampilan dan lemahnya akses modal dan ketersediaan lahan.

Langkah-langkah dalam mengurangi kemiskinan pada sektor pertanian dapat dilakukan dengan pengembangan agribisnis hulu-hilir, dengan memperkuat kemitraan petani dan kelompok, kemitraan kelompok dan pengusaha (akses pasar), meningkatkan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan dan berbasis sumberdaya lokal, menciptakan dan mengembangkan kawasan agribisnis terpadu berbasis sumberdaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussabti, et.al., 2009. Identifikasi karakteristik dan kebutuhan Rumah tangga miskin berbasis tipologi wilayah Di provinsi nangroe aceh darussalam. Riset Unggulan Strategis Nasional. Universitas Syaiah Kuala. Banda Aceh.
- Anhar, A. Dan Baihaqi, A. 2010. Analisa pasar produk olahan pertanian berbasis andalan/keunggulan daerah. Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Pelatihan Pengembangan Agrobisnis Tingkat Provinsi. Banda Aceh, 3 November 2010
- Anonymous, 2001. Kebijakan Dan Program Pembangunan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian 2001-2004. Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Anonymous. 2004. Kewirausahaan Dan Inovasi Usaha Agribisnis. Disampaikan pada Lokakarya dan Pembekalan Tim Pelaksana Program Mitra Desa – Institut Pertanian Bogor. . Departemen Agribisnis FEM. IPB. Bogor.
- Anonymous. 2008. Analisa dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Baihaqi, A. 2013. Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Dan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Agriseip. Vol 14 Nomor 2 ISSN : 1411-3848. Fakultas Pertanian. Universitas Syaiah Kuala. Banda Aceh
- Downey ,W. D. Dan S.P. Erickson. 1992. Manajemen Agribisnis. Edisi ke2.Terjemahan R . Ghanda S . Dan A.Sirait. Jakarta : Erlangga
- Firdaus, Muhammad.2009.Manajemen Agribisnis. Bumi Aksara. Jakarta.
- Herbert, P. 2001. The DAC Guidelines Poverty Reduction.
- Romano, 2010. Pewilayahan dan model pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan di provinsi Aceh. Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Pelatihan Pengembangan Agrobisnis Tingkat Provinsi. Banda Aceh, 3 November 2010.
- Soemarno, 1996. Managemen Agribisnis: Organisasi Dan Manajemen Sumberdaya Manusia. Makalah Penataran Agribisnis bagi Kepala Bidang Pertanian Umum Kanwil Pertanian dan Kepala Sub Dinas Bina Usaha Lingkup Pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang
- Tim Kementerian Pertanian, 2013. Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013 - 2045 Pertanian Bioindustri Berkelanjutan. Solusi Pembnagunan Indonesia Masa Depan. Bito Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian RI. Jakarta.